



PERSAUDARAAN MADANI

(IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF ISLAM)

Andi Syaiful Zaimal

Biografi



DR. ANDI SYAIFUL ZAINAL, S.SOS., M.SI., CPS

Penulis adalah Dosen PNS pada Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sultanbatara Kementerian Pendidikan Nasional dan saat ini DPK pada Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara. Pendidikan S1 Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, S2 Administrasi Publik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 Manajemen Publik pada Universitas Halu Oleo Kendari.

Sebelum menjadi Dosen, pernah Dinas diberbagai instansi Pemerintah, Seperti di Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Terakhir di Bappeda Kota Kendari.

PERSAUDARAAN MADANI

(IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SALAH PERSOFTER ISLAM)

Kebijakan Persaudaraan Madani yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan pola One family help one family. Kalau kebijakan Pemberdayaan sebelumnya pola pemberdayaan masyarakatnya adalah pemerintah memberdayakan masyarakat miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya, maka kebijakan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung, namun hanya memfasilitasi masyarakat mampu (orang kaya) agar dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu (orang miskin), atau dengan istilah lain, satu keluarga mampu dipersaudarakan dengan satu keluarga kurang mampu (One family help one family).

Kebijakan Persaudaraan Madani ini adalah program Pemerintah Kota Kendari yang digagas oleh Walikota Kendari Dr. Ir. H. Asrun., M. Eng dan Wakil Walikota Dr. Ir. H. Musadar Mappasomba, MP. Program ini mengadopsi kebijakan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kaum Nuhajirin yang merupakan penduduk pendatang dari Makkah dan kurang memiliki kemampuan finansial dipersaudarakan dengan Kaum Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah yang memiliki kemampuan finansial yang baik sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-127-2



9 786234 871272

**PERSAUDARAAN MADANI
(IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERSFEKTIF ISLAM)**

Andi Syaiful Zainal



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PERSAUDARAAN MADANI
(IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM)**

Penulis : Andi Syaiful Zainal

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-127-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Untuk Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Andi Zainal Abidin Wittiri, SH (alm) dan Ibunda Andi
Asnani Lakki

Untuk Keluargaku Tersayang
Attia Yuliana Djamal, SP (Istri)

Anak-anak:
Andi Shafa
Andi Dhafa
Andi Nhafa

PRAKATA PENULIS

Kebijakan Persaudaraan Madani yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan pola *One family help one family*. Kalau kebijakan sebelumnya pola pemberdayaan masyarakatnya adalah pemerintah memberdayakan masyarakat miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya, maka kebijakan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan pemerintah secara langsung, namun hanya memfasilitasi masyarakat mampu (orang kaya) agar dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu (orang miskin), atau dengan istilah lain, satu keluarga mampu dipersaudarakan dengan satu keluarga kurang mampu (*One family help one family*).

Kebijakan Persaudaraan Madani ini mengadopsi kebijakan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kaum Nuhajirin yang merupakan penduduk pendatang dari Makkah dan kurang memiliki kemampuan finansial dipersaudarakan dengan Kaum Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah yang memiliki kemampuan finansial yang baik sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil pelajaran pentingnya saling membantu antara warga yang mampu untuk senantiasa membantu saudaranya yang kurang mampu.

Kendari, 20 April 2021

Andi Syaiful Zainal

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
A. Literatur Teoritis Kebijakan Publik	1
B. Definisi Kebijakan Publik.....	2
C. Aktor-Aktor Kebijakan.....	4
1. Birokrat.....	5
2. Media Massa	6
3. Kelompok Intelektual Kampus dan Non Kampus ...	6
4. Masyarakat (Publik)	7
D. Implementasi Kebijakan Publik.....	8
BAB 2 KEMISKINAN	14
A. Definisi Kemiskinan.....	14
B. Bentuk-Bentuk Kemiskinan	22
C. Sebab-Sebab Kemiskinan	25
BAB 3 PEMBERDAYAN MASYARAKAT	28
A. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat	28
B. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	29
C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	41
BAB 4 PERSAUDARAAN MADANI.....	44
A. Masyarakat Madani di Indonesia.....	44
B. Dasar, Filosofi dan Konsep Persaudaraan Madani.....	51
C. Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2008 tentang Persaudaraan Madani.....	53
D. Mekanisme Operasional dan Organisasi Pelaksana Program	53
E. Sasaran	54
F. Target dan Capain Program.....	55
BAB 5 PERSAUDARAAN MADANI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSFEKTIF ISLAM	57
A. Kebijakan Persaudaraan Madani dalam Persfektif Islam.....	57
1. Pengambilan Data Profil Kedua Belah Pihak.....	70

2. Melakukan Sosialisasi Kepada Para Calon Keluarga yang Akan Dipersaudarakan.....	72
3. Fasilitasi Pertemuan oleh Tim Mediasi Pemerintah Daerah.....	85
4. Penandatanganan Akta Persaudaraan.....	87
5. Koordinasi	92
B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Persaudaraan Madani	102
1. Unsur Isi Kebijakan.....	102
2. Unsur Konteks Implementasi	111
DAFTAR PUSTAKA	156
BIOGRAFI PENULIS.....	164

BAB

1

KEBIJAKAN PUBLIK

A. Literatur Teoritis Kebijakan Publik

Mengikuti definisi Thomas Dye misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan (*Whatever governments choose to do or not to do*), hal senada juga disampaikan oleh Edward dan Sharkansky bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan disampaikan oleh pemerintah, termasuk tujuan, maksud, pelaksanaan dan peraturan (Kusumanegara, 2009).

Pemerintah yang dimaksud dalam buku ini yaitu pemerintah daerah dimana disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Studi ini adalah kebijakan publik, yakni bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks pemerintah daerah. Subbab ini *me-review* literature teoritik yang relevan untuk dijadikan standar analisis terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Kendari. *Review* ini akan meletakkan argument-argumen tentang definisi kebijakan publik, actor-aktor kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.

BAB

2

KEMISKINAN

A. Definisi Kemiskinan

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Levitan (Ninik Sudarwati, 2009) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (Suyanto, 1996), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada yang sama Emil Salim (Prayitno dan Arsyad, 1987)

BAB 3

PEMBERDAYAN MASYARAKAT

A. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menjadi pendekatan utama dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang turut melibatkan masyarakat. Secara filosofis, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai fokusnya. Masyarakat, mulai dari tingkat komunitas terbawah diberikan peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan pelaksanaan pembangunan hingga, monitoring dan evaluasi serta menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut timbul akibat adanya berbagai tanggapan atas kebijakan pembangunan di waktu lampau yang menganggap masyarakat sebagai obyek pembangunan saja. Pada hal masyarakatlah yang lebih mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Olehnya itu, apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau diberikan kewenangan dalam perencanaan program pembangunan, maka program pembangunan yang dilaksanakan bisa jadi tidak tepat sasaran atau program pembangunan tersebut bukanlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang bersumber pada kemampuan atau daya yang masyarakat miliki sendiri. Pemahaman tersebut mengandung arti bahwa pemberdayaan

BAB

4

PERSAUDARAAN MADANI

A. Masyarakat Madani di Indonesia

Masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw sendiri, yang memberikan teladan kearah pembentukan peradaban masyarakat. Dengan demikian masyarakat madani adalah masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw di Kota Madinah yang telah berhasil dalam prakteknya dengan menerapkan konstitusi Piagam Madinah, memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kalangan pemikir muslim menganggap masyarakat (kota) Madinah sebagai prototype masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam *civil society* (Madjid, 2015)

Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan diri pada konsep egalitarian pada tataran horizontal dan konsep ketakwaan pada tataran vertical. Nabi Muhammad saw telah meletakkan dasar-dasar masyarakat madani yang religious, kebebasan khususnya dibidang agama, ekonomi, sosial dan politik. Masyarakat madani yang dibangun Rasulullah tersebut memiliki karakteristik sebagai masyarakat beriman dan bertaqwa, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat tertib dan taat hukum, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana

BAB 5

PERSAUDARAAN MADANI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSFEKTIF ISLAM

A. Kebijakan Persaudaraan Madani dalam Persfektif Islam

Hendaklah orang-orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya, dan barang siapa yang sempit rizkinya maka hendaknya ia memberi nafkah sesuai apa yang diberi Allah kepadanya (QS. Al Thalaq: 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam ayat lain (QS. Al-Zariat: 19) Allah Swt berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Ayat tersebut di atas sesungguhnya menjadi landasan teologis sekaligus landasan teoritis yang menganjurkan pada hidup bersama, hidup berbagi, dan hidup damai diantara umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran (Firman Allah swt) dan Al-Hadits (Sabda Baginda Nabi Muhammad Saw)
- Aedy, Hasan. 2013. Studi Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Persaudaraan Madani Kota Kendari. Universitas Halu Oleo
- Agustina, Tri dan Irwansyah. 2017. Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Beras Oleh Pemerintah. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 2 / Desember 2017
- Ali, Faried dan Alam, Andi Syamsu, 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Reflika Aditama. Bandung
- Alsop, Ruth, and Nina Heinsohn, 2005. "Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators". *World Bank Policy Research Working Paper* 3510, February 2005.
- Aneta, Asna 2010. Policy Implementation Urban Poverty Program (P2KP) in the city of Gorontalo; *Journal of Public Administration*, Volume 1 No. 1 Year. 2010
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making*, Hlt, Rinehart and Winston. New York
- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Alfabeta, Bandung.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Pustaka Pelajar. Jogyakarta
- Ayumi, Nurul. 2009. Kepemimpinan Walikota Kendari dalam Proses Formulasi Kebijakan Persaudaraan Madani (Tesis). Universitas Indonesia
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*, BPS: CV Nario Sari
- Bahua, Mohamad Iqbal, 2011. "Tinjauan Analitis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan di Era Otonomi Daerah." *Informasi*, Vol. 16, No. 01 Tahun 2011, Hlm. 77-85.

- Bardach, E. 1979. *The Implementation Game: What Happens After A Bill Becomes A Law*. California: MIT Press.
- Barika, 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Se Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* Volume: 05. No. 01, Januari - Juni 2013 ISSN: 1979-7338
- Bowman, Ann O'M., 2005. Policy Implementation In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, edited by Jack Rabin. Boca Raton, FL.: Taylor & Francis Group. Pp. 209-212
- Brynard, P. A., 2005. "Policy Implementation: Lessons For Service Delivery." The 27th African Association for Public Administration and Management Annual Roundtable Conference, Livingstone, Zambia, 5th - 9th December 2005.
- Cahyat, A. 2004. *Bagaimana Kemiskinan di Ukur? Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia*. Poverty & Decentralization Project CIFOR
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- DeLeon, P and DeLeon, L. 2002. What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach. *Journal of Public Administration And Theory* 12 (4) pp. 467-492
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terj.). Yogyakarta: UGM Press.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Gupta, Dipak K., 2001. *Analyzing Public Policy: Concepts, Tools, and Techniques*. Wahington: CQ Press.
- Gergis, Abdalla, 1999. "Citizen Economic Empowerment in Botswana: Concepts & Principles." BIDPA Working Paper No. 22, July, 1999, tersedia online pada www.bidpa.bw
- Goggin Malcom L, 1990. *Implementation Theory and Practice: toward a Third Generation*. Scott, Foresman/Little Brown Higher Education. Illinisi
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press.

- Haughton, Jonathan and Kandker, Shahidur R. 2009. Handbook of Poverty and Inequality. World Bank, Washington DC, USA
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta (Studi Kasus di Kecamatan Laweyan). Tesis. Undip.
- Handler, Joel F and Hasenfeld, Yeheskel. 2007. Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality, Cambridge University Press, NY., USA
- Hikam, Muhammad AS, 1999. Demokrasi dan Civil Society. LP3ES, Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung
- Hill, Michael, and Hupe, Peter, 2002. Implementing Public Policy. London: Sage Publication.
- Henry, N., 2004. Public Administration and Public Affairs, Ninth Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. Jogyakarta
- Islami, M. Irfan, 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Jupp, D., Sohel Ibn Ali, and Carlos Barahona, 2010. "Measuring Empowerment? Ask Them Quantifying Qualitative Outcomes From People's Own Analysis. Insights for results-based management from the experience of a social movement in Bangladesh. Sida Studies in Evaluation. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Tersedia online pada www.sida.se/publications
- Jones, Chales O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Nashir Budiman. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Jones, Charles O 1996. An Introduction to the Study of Public Policy. Wads Worth. Inc
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media. Jogyakarta

- Lester, James P dan Stewart Jr, Josep, 2000. *Public Policy; An Evolutionary Approach (second edition)*. Wadsworth Thompson Learning. USA
- Machendrawaty, Nanih dkk, 1994. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Madekhan, Ali. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Everroes Press. Jokjakarta
- Madjid, Muh. Abdul. 2015. *Persaudaraan Madani, Jalan Terbaik Berantas Kemiskinan*. LSIP. Kendari
- Margono, Slamet. 2000. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluh Pembangunan dalam Pembangunan*. Dalam *Prosiding Seminar IPB Bogor. Pemberdayaan Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Pustaka Wira Usaha Muda.
- Nazara, Suahasil. 2007. "Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan program yang Realistis". Dalam *Warta Demografi* tahun ke 37. No 4 tahun 2007. Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nugroho, Riant Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Paisal, Doni. *Pengertian Profil*, dalam <http://catatansang1.blogspot.com/2015/02/pengertian-profil.html?m=1>
- Putra, Fadillah, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijaksanaan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN 1,410-4946 Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (Q95-324)
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Jokjakarta

- Peribadi, 2016. Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Partisipatif Berbasis ESQ Power, Sebuah Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kendari. Disertasi. Pascasarjana UHO
- Pressman, Jeffrey L dan Wildavsky, Aaron, 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press.
- Pranaka, A.M.W. 1996. "Globalisasi, Pemberdayaan dan Demokratisasi", dalam Omny dan Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Praja, Ageng Nata, 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan (Tesis)*. UNDIP Semarang
- Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincolin, 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. BPFE. Yogyakarta
- Sabatier, P.A. and Mazmanian, D.A., 1980. *The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*. *Policy Studies Journal*, 8 (special issue): 538-60
- Sadan, Elisheva, 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers [in Hebrew]
- Sajogyo, Pudjiawati dan Sjogyo, 1992. *Sosiologi Pedesaan jilid 2*. Gajah Mada University Press. Jogyakarta
- Santoso, Amir, 1986. *Public Policy Implementation: Rice Policy at the Regional Level in Indonesia, 1979-1984 (Ph.D Thesis)*, ANU, Canberra. Australia
- Siregar, Khairil Ikhsan. *Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*. Vol. 14, No. 2, Tahun. 2018.
- Seabrook, Jeremy, 2006. *Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. PT. Retika Adhitama. Bandung
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Alfabeta, Bandung
- Sudarwati, Ninik, 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Intimedia. Malang

- Sudaryanto, T. dan Rusastra, I.W. 2006. "Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka peningkatan produksi dan Pengentasan Kemiskinan". Dalam Jurnal Litbang Pertanian, 25 (4) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Suparlan, Parsudi, 1984. Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sukriyanto, 2015. Model-Model Pengembangan Masyarakat dalam era Kekinian. Lembaga Sentra Informasi Publik
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. Citra Utama
- Sumaryo. 1991. Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan dalam Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Mutu Pengabdian Masyarakat di IASIN Raden Intan Iskandar Lampung, 26 November 2005.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Suyanto, Bagong. 1996. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Aditya Media. Yogyakarta
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., dan Sumarto, S. 2006. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components of Growth. Working paper. Jakarta. Lembaga Penelitian Semeru
- Sirajuddin, dkk, 2014. Studi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Penguatan Modal Sosial Dalam Perspektif Komunikasi. Kerja Sama antara Bappeda Kota Kendari dengan Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari.
- Soetomo, 2011. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya? Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sholeh Chabib, 2014. Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Fokus Media. Bandung
- Scrutton, Claire and Cecilia Luttrell, 2007. *"The Definition and Operationalisation of Empowerment in Different Development*

Agencies Poverty-Wellbeing". Empowerment Note 2, available at www.povertywellbeing

- Stich, Bethany dan Eagle Kim, 2005. Planning to Include the Public Transportation Policy Implementation with Effective Citizen Involvement. Virginia Polytechnic Institute and State University. Public Works Management & Policy. Vol. 9 No. 4, April: 319-340. Sage Publications
- Stewart, Ailen Mitchell. 1998. Empowering People, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Alih bahasa Agus M. Harjana. Kanisius. Jokjakarta.
- Syamsudin, Imam, Al-Ghazi, 2005. Kitab Fath-hul Qarib. Penerbit Daar Ibn Hazm, Beirut
- Taqiyuddin, Al-Imam, Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushainiy Al-Hishniy Al-Dimasyqiy Al-Syafiiy. 2001. Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar. Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, Libanon, 1422H/2001M
- Torenviled, Rene dan Thomson, Robert, 2003. Is Implementation District from Political Bargaining? A Micro-Level Test. Rationality and Society. Vol. 15 (1) 64-84. London: Sage Publication
- Usman, Sunyoto, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in : Administration and Society, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Vladimer Papava. Caucasian Review Of International Affairs Vol. 3 (3) - Summer 2009 © CRIA 2009
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wakka., Abdul Kadir. 2014. Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol. 3 No.1, April 2014:47-45
- Wibawa, Samodra. et.al. 1986. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Wibawa. Samudra 1994, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta
- Widayanti, Sri, 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 87-102.
- Widjajanti, Kesi, 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011*, hlm.15-27
- Winarno, Haryo, Deni Zulkadi Pradono, dan Miming Diharja, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Bandung, Departemen teknik Planologi ITB.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta, Med Press.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan (Tesis)*. Undip. Semarang
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank
- Woodall J., Raine G., South J. and Warwick-Booth L., 2010. *Empowerment and Health & Well-being: Evidence Review*. Centre for Health Promotion Research, Leeds Metropolitan University
- Yusuf, Bakri, dkk. 2014. *Studi Identifikasi Komunitas Pemulung dan Pengemis Dalam Perspektif Sosio-Kriminologi*. Kerja Sama antara Bappeda Kota Kendari dengan Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari.
- Zulkarnaini, 2012. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Perkotaan; *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 1-55

BIOGRAFI PENULIS



**DR. ANDI SYAIFUL ZAINAL, S.SOS.,
M.SI., CPS**

Penulis adalah Dosen PNS pada Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sultanbatara Kementerian Pendidikan Nasional dan saat ini DPK pada Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pendidikan S1 Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, S2 Administrasi Publik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 Manajemen Publik pada Universitas Halu Oleo Kendari.

Sebelum menjadi Dosen, pernah Dinas diberbagai instansi Pemerintah, Seperti diKelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Terakhir di Bappeda Kota Kendari.